

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Konseptual.....	14
a. Pengertian Problematika	14
b. Pengertian Kedudukan	14
c. Pengertian Peraturan Bupati	15
d. Pengertian Hierarki Peraturan Perundang-undangan	16
F. Kerangka Teoritis	17
a. Teori Negara Hukum	18
b. Teori Hierarki Norma Hukum (<i>Stufentheorie-Hans Kelsen</i>) dan Norma Hukum Negara (<i>Die Theorie vom</i> <i>Stufenordnung der Rechtsnormen-Hans Nawiasky</i>).....	20
c. Teori Kewenangan	24
G. Metode Penelitian	27
1. Metode pendekatan	28
2. Spesifikasi penelitian	28
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	29
4. Metode Pengumpulan Data.....	32
5. Metode Analisis Data.....	32

H. Sistematika Penulisan	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Negara Hukum	35
1. Ide Negara Hukum	35
2. Negara Hukum <i>Rechtstaat</i>	38
3. Negara Hukum <i>Rule of Law</i>	39
4. Negara Hukum Indonesia	42
B. Peraturan Perundang-undangan	46
1. Istilah dan Pengertian Peraturan Perundang-undangan	46
2. Bentuk Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang- Undang Dasar	51
3. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan	55
C. Perkembangan Pengaturan tentang Hierarki Perundang- undangan di Indonesia	60
D. Diskresi dan Peraturan Kebijakan, Peraturan Delegasi	78
1. Pengertian Diskresi	78
2. Peraturan Kebijakan	86
a. Pengertian Peraturan Kebijakan	86
b. Bentuk dan Karakter Peraturan Kebijakan	90
3. Peraturan Delegasi	94
E. Legislasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional (<i>Taqnin Al-Ahkam</i>).....	96
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	100
A. Tujuan Adanya Hierarki Peraturan Perundang-undangan Dalam Sistem Hukum Indonesia	100
B. Kedudukan Peraturan Perundang-undangan di Luar Hierarki Peraturan Perundang-undangan	123
C. Problematika Kedudukan Peraturan Bupati dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan	128
BAB IV PENUTUP.....	146
A. Simpulan	146
B. Saran	149
DAFTAR PUSTAKA	151